

ABSTRAK

Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis yang diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa pada Desa Sruni Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sruni Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara efektif jika dibandingkan dengan kenyataan yang didapatkan dari lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan desa pada Desa Sruni Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah 91% difokuskan pada sarana dan prasarana fisik yaitu 18 program dan kegiatan pembangunan terlaksana sedangkan 9% sebagai dana cadangan. Kendala dalam implementasi Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Sruni Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali adalah dasar hukum peraturan perundangan yang belum ada solusi di tingkat pemerintahan desa sebab menunggu dari pemerintah kabupaten Boyolali. Perlu adanya pengaturan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sruni dengan solusi Kepala Desa Sruni perlu menempatkan orang-orang yang tepat yang memiliki kemampuan sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Sruni. Sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sruni kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa sehingga perlu regenerasi, perlu ada kelengkapan sarana dan prasarana serta budaya kerja pemerintah Desa Sruni yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci : alokasi dana desa, pemerintah desa

ABSTRACT

Allocation of Village Funds is carried out using allocations that are distributed evenly and allocations are divided based on population, area, poverty rate, and the level of geographical difficulties that are expected to increase equitable development of village welfare through improving public services in the village, advancing the village economy, overcoming inequalities inter-village development and strengthening of rural communities as subjects of development. This study aims to determine and examine the Village Fund Allocation in realizing Village development in Sruni Village, Musuk Sub-District, Boyolali District and the obstacles faced by the Sruni Village Government, Musuk Sub-District, Boyolali Regency in implementing the Village Fund Allocation and how it has been overcome.

This research uses the empirical juridical approach method which is the approach that will be used to analyze how the legislation applies namely Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Governments and Law Number 6 of 2014 concerning Villages effectively if compared to the reality obtained from the field. The specification of this research is analytical descriptive, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems.

The allocation of Village Funds in realizing village development in Sruni Village in Musuk Sub-district in Boyolali Regency is 91% focused on physical facilities and infrastructure namely 18 development programs and activities carried out while 9% as a reserve fund. Constraints in the implementation of the Village Fund Allocation Sruni Village Government Musuk Subdistrict Boyolali Regency is the legal basis of legislation that has not been a solution at the village government level because it waits from the Boyolali district government. It is necessary to arrange the Organizational Structure and Work Procedures of the Sruni Village Government with the solution The Sruni Village Head needs to place the right people who have the ability in accordance with the work they are doing in the organizational structure and governance work of the Sruni Village Government. The human resources of the Sruni Village government apparatus lack understanding of its role in the village administration so that it needs to be regenerated, there needs to be a complete set of facilities and infrastructure as well as the work culture of the Sruni Village government which needs to be improved.

Keywords: village fund allocation, village government